



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024**

## **DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU**

**Rahayu Oktarisah<sup>1\*</sup> Annie Mustika Putri<sup>2</sup> Zul Azmi<sup>3</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammdyah Riau,Pekanbaru,Indonesia

*Rahayuoktarisah97@gmail.com, Annemustika@umri.ac.id2, Zulazmi@umri.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The quality of the financial reports of the regional government of Riau Province is the aim of this research which is carried out by analyzing several determined factors. The data collected was in the form of a questionnaire for the population in 39 OPDs. The sampling method was the purposive sampling method with a total of 117 respondents in all OPDs. This type of research is quantitative data processed using IBM Statistics SPSS 22. And the results show that Government Accounting Standards, Accounting Information Systems, Human Resource Competencies and Internal Control Systems influence the Quality of Regional Government Financial Reports, in contrast to the Use of Information Technology having no influence On the Quality of Regional Government Financial Reports.*

**Keywords:** *Accounting Standards, Information Systems, Competencies, Control Systems, Report Quality*

### **ABSTRAK**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau adalah tujuan penelitian ini di lakukan menganalisis dari beberapa faktor yang di tentukan. Data yang di kumpulkan berbentuk kuisioner sebanyak populasi di 39 OPD. Metode pengambilan sampel yaitu metode puposive sampling dengan jumlah 117 responden di seluruh OPD. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif data yang di olah memakai IBM Statistics SPSS 22. Dan mendapat hasil bahwa Standar Akuntansi Pemerintah,Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbeda dengan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi, Sistem Informasi, Kompetensi, Sistem Pengendalian, Kualitas Laporan.

### **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan yang berkualitas apabila di sajikan laporan keuangann di suatu entitas pelaporan yang harus memiliki empat karakteristik diantaranya relevan, andan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam tujuh tahun terakhir Provinsi Riau telah meraih keberhasilan wajar tanpa pengecualian(WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (BPK, 2022). LKPD harus disajikan dalam bentuk pengolahan yang jujur dan efektif serta efesien secara subtantif dalam mencapai sasaran keadilan untuk seluruh masyarakat Provinsi Riau.

**Hasil Opini BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2015-2021**

Hasil Opini BPK						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Riau.bpk.go.id (2022)

Hasil dari tabel 1.1 diketahui bahwa opini yang diberikan BPK RI atas Pemerintah Provinsi Riau periode 2015-2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dikarenakan tata kelola dan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Riau yang transparan dan akuntabel selama tujuh tahun terakhir, meskipun ada terdapat beberapa koreksi dari BPK yang di temui tetapi masih bisa di atasi. Yaitu kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas sebelas paket pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan pada Dinas PURPKPP dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau belum sepenuhnya memadai(riau.bpk.go.id). Berdasarkan undang-undang peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah akan menjadi referensi untuk perencanaan, proses menggunakan anggaran, proses monitoring sampai proses untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Peneliti tertarik untuk meneliti kembali sebagai penelitian lanjutan sebagai kofirmasi atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Armel et al., (2017) Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya penulis menambah variabel Sistem Informasi Akuntansi dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan pada Sistem Informasi Akuntansi dan Objek yang berbeda. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “*Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau*”.

**KAJIAN LITERATUR**

***Teori Stewardship***

Penelitian ini menggunakan teori Stewardship yang merupakan bagian dari teori agensi. Sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor public telah di persiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Dalam kaitannya dengan penelitian ini teori stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan public. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards(manajemen) harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi penggunanya.

***Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah***

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan, adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif.

***Penerapan standar akuntansi pemerintah***

Standard akuntansi pemerintah (SAP) merupakan serangkaian prosedur yang di mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang di gunakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

***System informasi akuntansi***

Sistem informasi akuntansi di artikan menurut Susanto (2004) sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Yang dapat di ukur teknologi produktivitas pengguna, meningkatkan kinerja pengguna dan meningkatkan efisien proses yang di lakukan pengguna.

**Pemanfaatan teknologi informasi**

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Armel et al., 2017).tekhnologi yang menggunakan computer berfungsi sebagai mengolah data,system jaringan untuk menghubungkan satu computer dengan computer lainnya sesuai kebutuhan yang dapat di akses secara global.

**Kompetensi sumber daya manusia**

Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, SDM sebagai factor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintahan itu sendiri (Armel et al., 2017).

**System pengendalian internal**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rai (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif data kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau yang terdiri dalam dinas, badan, biro berjumlah 39 OPD. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan data di kumpulkan dengan cara memberikan daftar pertanyaan berbentuk kuesioner kepada responden.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode teknik secara *purposive sampling*. Adapun kriteria yang di tentukan dari responden yaitu:

1. Staf/pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Staf/pegawai OPD yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma.

Sampel dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 responden dari 39 OPD kota Pekanbaru, dengan total sampel 117 responden. Dimana sampel dan juga responden disini yaitu kepala sub bagian keuangan, staf sub bagian keuangan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (PPK-OPD).

**Defenisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan keuangan merupakan produk aktif dari sistem akuntansi yang berlaku pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan.	1. tingkat relevan 2. tingkat keandalan 3. tingkat keterbandingan	<i>Likert</i>

		4. tingkat keterpahaman yang diadaptasi dari (Armel et al., 2017)	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Penerapan SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	1. Penyajian laporan Keuangan. 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Akuntansi Persediaan 6. Akuntansi Investasi 7. Aset Tetap (Armel et al., 2017)	<i>Likert</i>
Penerapan sistem informasi akuntansi (X2)	Pengertian sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis, mengolah informasi keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan.	1. Kualitas Sistem. 2. Kualitas Informasi. 3. Kualitas Layanan. 4. Pengguna Sistem (Tawaqal & Suparno, 2017)	<i>Likert</i>
Pemanfaatan teknologi informasi (X3)	Sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.	1. Memiliki komputer 2. Jaringan internet 3. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik 4. Sistem terkomputerisasi 5. Penggunaan Software 6. Laporan akuntansi dari system informasi 7. Pemeliharaan Peralatan (Armel et al., 2017)	<i>Likert</i>
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	Penerapan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM), yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Skill (Armel et al., 2017)	<i>Likert</i>

	berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah		
Sistem Pengendalian Internal (X5)	Sistem pengendalian intern juga merupakan kegiatan pengendalian pengelolaan sistem informasi yang tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. SPI yang dikontrol secara optimal mendorong kelancaran pengoperasian sistem manajemen. Sistem pengendalian intern akan lebih bermanfaat bila didukung dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan sehingga pengelolaan dan administrasi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.	1. Lingkungan Pendendalian. 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi 5. Komunikasi 6. Pemantauan (Armel et al., 2017; Hafidah, 2016)	<i>Likert</i>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Statistika Deskriptif*

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	89	14,00	27,00	20,3371	2,56703
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	89	14,00	26,00	19,5843	2,49458
Pemanfaatan Teknologi Informasi	89	14,00	26,00	19,8427	2,61507
Kompetensi Sumber Daya Manusia	89	15,00	28,00	20,7079	2,41304
Sistem Pengendalian Internal	89	15,00	25,00	20,5843	2,41590
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89	14,00	23,00	18,5618	1,95376
Valid N (listwise)	89				

### *Uji Kualitas Data*

Menurut Ghozali (2018) uji validitas data digunakan untuk mengetahui seberapa baik instrumen mengukur konsep dan tingkat validitas pada setiap pertanyaan. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan Bivariate Pearson dalam SPSS. Dengan jumlah 117 responden dan nilai signifikansi

5% diperoleh Rtabel sebagai berikut :

$$R_{tabel} = Df = (N - 2) = 89 - 2 = 87 \text{ (5\%)} = 0,208$$

**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Ket
Standar Akuntansi Pemerintah	0,716	0,60	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi	0,753	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,710	0,60	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,732	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,709	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,709	0,60	Reliabel

Hasil uji di atas dihitung bahwa nilai cronbach alpha besar dari 0,60, sebaliknya reabilitas kurang dari 0,60 dinilai kurang baik. Kemudian jika hasil di atas 0,60 maka dapat di terima. Hal ini menunjukkan bahwa indicator pada masing-masing variable dikatakan reliable.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,11903421
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,041
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai p-value (asym.Sig 2- tailed) 0,200 (0,200 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

Diperoleh nilai tolerance masing-masing variabel independen (0,733; 0,844; 0,660; 0,914 dan 0,631) lebih besar dari 0,1 atau VIF (1,365; 1,184; 1,514; 1,094 dan 1,584) yang lebih kecil dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

**Uji heterokedastisitas**

Dari uji Glejser diatas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) masing-masing variabel independen sebesar 0,931; 0,284; 0,921; 0,341 dan 0,976 > 0,05. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

**Uji Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,083	1,575		,053	,958

TOTAL_ X1	,194	,056	,254	3,464	,001
TOTAL_ X2	,145	,054	,185	2,708	,008
TOTAL_ X3	,048	,058	,064	,832	,408
TOTAL_ X4	,109	,053	,135	2,051	,043
TOTAL_ X5	,412	,064	,510	6,440	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. H1: Pada table diatas menunjukkan niai sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05, dan thitung 3,464 lebih besar dari t tabel 1.989 Yang artinya standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan demikian hipotesis pertama dapat di terima.
2. H2: Dalam data tabel tersebut, di dapat bahwa nilai t hitung 2.708 yang nilai nya lebih besar dari t tabel 1.989 dan nilai sig.0,008 lebih kecil dari 0,05. Ini artinya variabel system informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulan H2 dapat diterima.
3. H3: Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak ada peparuh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan nilai sig.0,408 dengan thitung lebih kecil dari t tabel atau  $0.832 < 1.989$  kesimpulannya  $H_3$  ditolak.
4. H4: Variabel kompetensi sumber daya manusia t hitung lebih kecil daripada t tabel atau  $2,051 > 1.989$  dengan  $0,043 < 0,05$  lebih kecil dari nilai signifikasinya yaitu 0.043 Hal ini artinya variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara secara signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kesimpulannya  $H_4$  diterima.
5. H5: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan thitung lebih kecil dari t tabel atau  $6,440 > 1.989$  dengan nilai signifikasi  $0,000 < 0,05$ , kesimpulannya  $H_5$  diterima.

## PEMBAHASAN

### ***Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah(SAP)memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan thitung sebesar 3.464 dimana lebih besar dari t tabel sebesar 1.989.

Menurut Cribb (2006), hubungan yang terjadi pada standar akuntansi pemerintah daerah denan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan teori Stewardship, menyebutkan dimana teori ini dapat berfungsi sebagai mekanisme bentuk pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan,audit dan pelaporan sebaik-baiknya agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tawaqal & Suparno (2017) & Rohmah et al. (2020) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### ***Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyimpulkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Dibuktikan thitung sebesar 2.708 dimana lebih besar dari t tabel sebesar 1.989.

Akuntansi sector publik pada teori *Stewardship* telah di persiapkan untuk sebagai pemenuhan kebutuhan informasi antara steward dengan principal. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas

sangat tergantung pada sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2020) diketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Variabel pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah Provinsi Riau belum berpengaruh, disebabkan tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi di kategorikan baik tetapi sebenarnya pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi belum mampu sepenuhnya untuk mempertinggi efektifitas, kendala kinerja dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dapat di buktikan dengan thitung sebesar 0.832 dimana lebih kecil dari ttabel sebesar 1.989

Teori *Stewardship* dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah membuat bentuk tanggung jawab keuangan yang di berikan kepada pemerintah. Kemudian tujuan ekonomi dan pelayanan publik ataupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Berkaitan dengan teknologi yang mengolah data, system jaringan yang dapat menghubungkan satu computer dengan computer lainnya sesuai dengan kebutuhan agar data dapat disebar dan di akses secara global.

Pemilihan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik pemerintah daerah dapat mengakibatkan ketidakcocokan dalam pengelolaan data keuangan. Jika sistem tidak dirancang untuk mendukung kebijakan dan prosedur yang ada, maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan menurunkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini searah dengan Chodijah & Hidayah (2018) yang hasilnya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Bahwa kompetensi sumber daya manusia kompeten di bidang akuntansi. Hal tersebut dapat di buktikan dengan thitung sebesar dimana 2.051 lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.

Berdasarkan teori *Stewardship*, dimana jika ada hubungan yang baik antara sistem pengendalian dan sumber daya manusia maka dapat di katakan kinerja pemerintah akan semakin meningkat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Investasi dalam pengembangan kompetensi SDM adalah investasi yang kritis untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah andal, relevan, dan mematuhi standar yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Armel et al. (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam penelitian tersebut sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan efektifitas di dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah.

### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intenal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Penelitian ini mendukung dugaan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan thitung sebesar dimana 6.440 lebih besar dari ttabel sebesar 1.989.

Didalam teori *Stewardship*, dimana lembaga pada suatu pemerintah daerah yang dapat di percaya dalam bertindak membuat pertanggungjawaban demi mencapai tujuan yang dibuat maka dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai. Dengan SPI yang kuat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. begitupu dengan penelitian yang di lakukan oleh Tawaqal & Suparno, (2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan variabel-variabel yang telah di teliti bahwa standar akuntansi pemerintah(X1), system informasi akuntansi(X2), kompetensi sumber daya manusia(X4) dan system pengendalian internal(X5) berpengaruh positif terhadap Y kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan variabel pemanfaatan tekhnologi informasi(X3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel dan meneliti di daerah lain yang berkaitan dengan kualitas laporan pemerintah daerah. Selanjutnya, diharapkan untuk dapat menambah pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan respon terkait agar mendapat hasil yang lebih relevan.

## DAFTAR LITERATUR

- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, 4(1), 105–119.\
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34–49.
- Cribb, J 2006 Agents or Stewards ? Contracting with. *Policy Quartely*, 2(2), pp11-17
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangandaerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-JRA*, 9(5), 43–51
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 125–135